

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD), penerapan *Good Governance* dan akuntabilitas keuangan. Sementara Subjek dari penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintahan kota Bekasi.

### **3.2 Metode Penelitian**

#### **3.2.1 Desain Penelitian**

Metode penelitian adalah istilah terjemahan dari serapan kata bahasa Inggris “*research*”. Dari hal tersebut para ahli menerjemahkan arti kata “*research*” sebagai riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata re’ yang memiliki makna “kembali” dan *to research* yang bermakna “mencari”. Dengan demikian, arti sebenarnya dari kata *research* atau riset dalam bahasa Indonesia adalah “mencari kembali”. Secara umum metode penelitian dapat dimaknai sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Ramdhan, 2021 ).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang menggambarkan situasi yang terjadi pada masa sekarang, dimana data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan hasil akhir yaitu kesimpulan.

Metode analisis deskriptif juga dapat diartikan sebagai bentuk analisis mengenai data diri responden, yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang telah diajukan, kemudian dari data yang diperoleh akan dihitung persentase dari data responden.

### 3.3 Definisi dan Operasional Variabel

#### 3.3.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas atau *Independent Variable* merupakan variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel dependen (terikat) (Sugiyono. 2019 ).

##### 3.3.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah instrumen penting dalam mengatur pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang tentunya berfungsi untuk meningkatkan terkait transparansi, akuntabilitas, dan juga efisiensi dalam penggunaan dana publik. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dirancang untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan daerah dicatat, dilaporkan, dan diperiksa secara tepat dan akurat sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berlaku. Di Indonesia, penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan mendorong pertanggungjawaban (Strivany, 2024 ).

Instrumen/kuesioner untuk mengukur variabel Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan Kualitas Laporan keuangan mengacu pada kuesioner yang dipakai dalam penelitian Siska Yulia Defitri (2018). Pengukuran instrument menggunakan skala likert, yang mana semakin besar skor menunjukkan penerapan SAKD semakin baik dan semakin kecil skor menunjukkan penerapan SAKD semakin buruk.

##### 3.3.1.2 *Good Governance* (X2)

Penerapan *Good Governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak

kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Konsep penerapan dalam suatu negara tidak hanya menjadi sebuah tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi ini saja. Namun, makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis yang harus dituntut untuk dapat selalu berubah dalam suatu kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan menjadikan suatu konsep *Good Governance* sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik ke pada masyarakat secara menyeluruh (Sulfiani, 2021 ).

Instrumen yang digunakan dalam bentuk kuesioner mengacu pada penelitian Hilda Sri Hastuti (2017). Pengukuran instrument menggunakan skala likert, yang mana semakin besar skor menunjukkan penerapan *Good Governance* semakin baik, dan semakin kecil skor menunjukkan penerapan *Good Governance* semakin buruk.

### 3.3.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi kibat, karena terdapat variabel bebas (Sugiyono, 2019 )

#### 3.3.2.1 Akuntabilitas Keuangan (Y)

Akuntabilitas keuangan merujuk pada kewajiban dan keterbukaan suatu entitas, baik itu pemerintah, organisasi, atau perusahaan, dalam mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan sumber daya keuangannya. Ini mencakup tanggung jawab untuk menjaga integritas, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan laporan yang akurat dan dapat dipercaya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Akuntabilitas keuangan melibatkan pemahaman, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan dengan itikad baik guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan membangun

kepercayaan publik terhadap lembaga yang bersangkutan (Putri, Suhaidar et al. 2024).

Instrumen yang digunakan dalam bentuk kuesioner mengacu pada penelitian Rio Baviga (2022). Pengukuran instrument menggunakan skala likert, yang mana semakin besar skor menunjukkan akuntabilitas keuangan semakin baik dan semakin kecil skor menunjukkan penerapan *Good Governance* semakin buruk.

### 3.3.3 Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan batasan dari sebuah pengertian mengenai tentang variabel dependen dan juga variabel independen yang didalamnya sudah mengandung indikator dan dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini akan menjelaskan dengan tabel berikut ini.

**Tabel 3. 1 Operasional Variabel**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
1	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X1  Siska Yulia Defitri (2018)	Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Prosedur pencatatan transaksi sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum	Ordinal	1
			Pencatatan yang digunakan efektif	Ordinal	2
			Penjurnalan dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah.	Ordinal	3
		Pelaporan Sistem Akuntansi	Dilakukan sudah secara optimal	Ordinal	4

			Dilaksanakan dengan benar tanpa penyimpangan.	Ordinal	5
2	<i>Good Governance</i> X2  Hilda Sri Hastuti (2017)	Transparency (Transparansi)	Adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan	Ordinal	1
		Rule of Law	Kerangka hukum yang adil dilakukan tanpa pandang bulu	Ordinal	2
		Responsiveness (Responsive)	Lembaga publik cepat dan tanggap melayani stakeholder	Ordinal	3
		Efficiency dan effectiveness	Meminimalkan input dan memaksimalkan output (penggunaan sumber daya finansial secara maksimal)	Ordinal	4
		Accountability (Akuntabilitas)	Proses pembuatan keputusan yang dibuat tertulis, tersedia bagi yang membutuhkan, memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar	Ordinal	5
3	Akuntabilitas Keuangan Y  Rio Baviga (2022)	Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.	Terdapat mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana publik	Ordinal	1

			Tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan yang sudah ditetapkan	Ordinal	2
			Penggunaan dana publik dilakukan secara efisien dan efektif	Ordinal	3
		Akuntabilitas Kinerja keuangan	Transparansi dan keterbukaan informasi terhadap masyarakat	Ordinal	4
			Kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terkait laporan keuangan sudah terpenuhi	Ordinal	5

Sumber : Diolah primer 2025

### 3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur dan merupakan unit yang diteliti. Dalam hal ini populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah staf keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 44 Perangkat Daerah yang meliputi dinas, badan, dan kantor di pemerintahan Kota Bekasi.

#### 3.4.2 Sampel

Sampel menurut (Sugiyono, 2019) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memilih individu

berdasarkan kemudahan akses, ketersediaan waktu, dan kedekatan lokasi, tanpa mempertimbangkan probabilitas keterwakilan populasi secara statistik (Sugiyono 2019).

Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh dinas yang berada di Kota Bekasi yang berjumlah 44 OPD. Dimana variabel mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), *Good Governance* dan Akuntabilitas Keuangan yang menjadi responden yaitu pada Bagian Keuangan tepatnya PPK-SKPD.

Adapun alasan atau kriteria/ karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : yang mana salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan penata kelolaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan.
2. PPKD-SKPD : pejabat penatausahaan keuangan SKPD yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada SKPD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPKD-SKPD.

Dipilihnya responden di atas, karena mereka memiliki tugas dan tanggungjawabnya dalam jabatannya yang dapat memahami penerapan SAKD, *Good Governance*, dan akuntabilitas keuangan. Untuk lebih jelasnya berikut sampel responden pada satuan kerja perangkat daerah pemerintahan Kota Bekasi.

**Tabel 3. 2 Sampel Penelitian**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi
1	Sekretariat Daerah Kota Bekasi
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi
3	Inspektorat Kota Bekasi
4	Dinas Pendidikan Kota Bekasi
5	Dinas Kesehatan Kota Bekasi
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi
7	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
8	Dinas Sosial Kota Bekasi
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
12	Dinas Perhubungan Kota Bekasi
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
15	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi
18	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bekasi
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bekasi
24	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

Mochammad Reza Fadli, 2025

*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Keuangan*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

25	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
26	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi
30	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi
31	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi
32	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi
33	Kecamatan Bekasi Timur
34	Kecamatan Bekasi Utara
35	Kecamatan Bekasi Barat
36	Kecamatan Bekasi Selatan
37	Kecamatan Medan Satria
38	Kecamatan Rawalumbu
39	Kecamatan Jatiasih
40	Kecamatan Pondokgede
41	Kecamatan Pondok Melati
42	Kecamatan Jatisampurna
43	Kecamatan Bantargebang
44	Kecamatan Mustikajaya

Sumber: Data primer 2025

### 3.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban responden atas instrumen penelitian pada kuisisioner yang berhubungan dengan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), penerapan *Good Governance* dan

Akuntabilitas Keuangan. data ini dikumpulkan dengan cara mengirim kuesioner ke responden secara langsung. Kuesioner didistribusikan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi.

Langkah Selanjutnya data yang telah diklasifikasikan diolah ke dalam rumus statistik yang digunakan sesuai dengan rencana analisis untuk pengukuran atas variabel yang dikorelasikan. Hasil data yang telah diolah lanjut dianalisis diperoleh implikasi terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian.

Responden dari variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan *Good Governance* yaitu bagian dari keuangan suatu instansi, dimana penelitian dilakukan, dan responden untuk variabel Akuntabilitas Keuangan yaitu Bagian Keuangan dari suatu instansi.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono,2008). Statistik deskriptif melibatkan transformasi data mentah menjadi bentuk yang akan memberikan informasi untuk menggambarkan serangkaian faktor dalam suatu situasi.

#### **3.5.2 *Partial Least Square* (PLS)**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis *Partial Least Square* yang menggunakan alat uji Smart PLS. *Partial Least Square* (PLS) merupakan persamaan dari *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menginterpretasikan dan menganalisis data dengan menggunakan alat uji yang sudah disebutkan sebelumnya. *Structural Equation Modeling* merupakan salah satu teknik analisis *multivariate* yang dapat menganalisis hubungan variabel secara kompleks. Teknik analisis ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur pengaruh derajat antar variabel yang telah teridentifikasi indikator-indikatornya.

### 3.5.2.1 *Outer Model (Model Pengukuran)*

*Outer model* atau model pengukuran menjelaskan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya (Ghozali, 2019). *Outer model* dengan indikator refleksif dievaluasi menggunakan Uji Validitas (*Convergent Validity* dan *Discriminant Validity*) dari indikatornya dan Uji Reliabilitas (*Construct Reliability*) untuk blok indikator (Ghozali, 2019).

Uji validitas yang pertama adalah *convergent validity* atau validitas konvergen. Pengujian *convergent validity* dapat dilihat dari korelasi antara *score* butir/indikator dengan *score* konstraknya. Indikator individu dianggap valid, jika nilai korelasi lebih besar atau sama dengan 0,50 (Ghozali, 2019). Uji validitas yang kedua adalah *discriminant validity* atau validitas diskriminan. *Discriminant validity* dapat dilakukan dengan cara melihat *discriminant validity* pada model pengukuran dengan indikator refleksif yang dinilai berdasarkan *score cross-loading* pengukuran konstruk (Ghozali, 2019).

Selanjutnya, uji reliabilitas dengan *construct reliability* atau reliabilitas konstruk yang diukur menggunakan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Konstruk ini dinyatakan *reliable*, apabila nilai *composite reliability* maupun *cronbach's alpha* di atas 0,70 (Ghozali, 2019).

### 3.5.2.2 *Inner Model (Model Struktural)*

*Inner model* atau model struktural dilakukan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk laten dan konstruk laten lainnya. *Inner model* dapat diuji dengan melihat nilai *R-square* dan *Q-square* untuk mengetahui seberapa besar variabel laten dependen dipengaruhi oleh variabel laten independen, serta uji signifikansi untuk menguji nilai signifikansi antar variabel (Ghozali, 2019).

### 3.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis *full model structural equation modeling (SEM) dengan smartPLS*. Dalam *full model structural equation modeling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten (Ghozali, 2012). Pengujian hipotesis dengan melihat nilai perhitungan *Path Coefficient* pada pengujian *inner model*. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel 1,96 untuk *two tailed* dan 1,64 untuk *one tail* ( $\alpha$  5%) yang berarti apabila nilai t statistik setiap hipotesis lebih besar dari t tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti secara Parsial.

#### 1. Hipotesis Penelitian (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah)

$H_0 : \beta < 0$  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan

$H_{a1} : \beta \geq 0$  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan

#### 2. Hipotesis Penelitian (*Good Governance*)

$H_0 : \beta < 0$  Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan

$H_{a2} : \beta \geq 0$  Penerapan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan

#### 3. Hipotesis Penelitian (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *Good Governance*, dan Akuntabilitas Keuangan)

$H_0 : \beta < 0$  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan

$H_{a3} : \beta \geq 0$  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.